



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NYOMAN SHUIDA**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA KEMARITIMAN**
3. NHK : **147344**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 660.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIGRA/LCGC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.500.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 149.768.845

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.008.768.845

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.008.768.845

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.